

Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Perbankan

SUTİYOK* & EVI RAHMAWATI

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183, Telp +274 387656, D.I. Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Author, E_mail address: Sutyokumy@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze whether the mechanism of corporate governance has the influence on the level of mandatory disclosure with the IFRS convergence. The sample used in this study is the banking industry listed at Indonesian Stock Exchange in 2011-2012. Disclosure checklist from Bapepam LK is used to identify the mandatory disclosure items. The items are adjusted to GAAP applicable in Indonesia. The results of this study indicates that the total number of meetings of the Board of Commissioners and Board of Commissioners have significant effect on the level of the compliance of the mandatory disclosure convergence with IFRS. However, the number of audit committee have no influence on the level of mandatory disclosure compliance convergence IFRS.

Keywords: Mandatory Disclosure; Corporate Governance; the Board of Commissioners; Ownership Dispersion; Audit Committee .

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan wajib atas konvergensi IFRS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012. *Checklist* pengungkapan dari Bapepam LK digunakan untuk mengidentifikasi item pengungkapan wajib. Item yang disesuaikan dengan GAAP yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah ewan komisaris dan jumlah rapat d dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas konvergensi IFRS. Namun, jumlah komite audit tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pengungkapan konvergensi IFRS.

Kata kunci: Pengungkapan Wajib; Tata kelola perusahaan; Dewan Komisaris; Dispersi kepemilikan; Komite Audit.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan tahunan merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengkomunikasikan hasil informasi keuangan tersebut kepada pihak luar dengan tujuan untuk menarik para investor supaya mereka menginvestasikan modal ke perusahaan. Proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal diterangkan bahwa kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik. Hal tersebut mengemukakan bahwa sarana untuk memberikan komunikasi dan informasi keuangan yang harus diungkapkan secara transparan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang diungkapkan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil

keputusan yang berkaitan dengan investasi dana yang mereka kontribusikan untuk perusahaan. Untuk itu para pemegang saham menginginkan pengungkapan yang transparan.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) laporan tahunan sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keuangan yang diungkapkan maka, perusahaan akan dipandang berkualitas baik. Kebutuhan perusahaan dalam mengungkapkan pelaporan keuangan sudah secara jelas disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bahwa pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang dibuat dapat disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan semua pihak, untuk dapat mencapai target dan mempertahankan kesuk-sesan usaha. Kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan meningkat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Hikmah (2011) menjelaskan pentingnya luas pengungkapan laporan tahunan bagi para pihak eksternal agar tidak terjadi asimetri informasi yaitu informasi yang dimiliki pihak internal lebih luas atau lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal. Pengungkapan laporan tahunan harus akurat, tepat waktu, dan transparan dapat menambah nilai bagi para stakeholders. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para stakeholder tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh

manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Adanya peraturan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan termasuk aturan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai kondisi masing-masing bank, yang menjadikan perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”. Bank merupakan lembaga yang menjalankan kegiatannya bergantung dari pendanaan masyarakat dan kepercayaan. Laporan tahunan merupakan media yang digunakan oleh perusahaan *go public* untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar manajemen (Hikmah, 2011). Pihak luar manajemen yang berkepentingan seperti kreditor, investor, masyarakat, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya. Kualitas informasi dapat dilihat dari pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

TEORI AGENSI

Hubungan antara manajer dengan para pemegang saham dalam perusahaan sangat penting karena mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan profitabilitas, seperti yang dijelaskan dalam teori agensi. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara agen dan prinsipal. Dimana agen adalah pihak-pihak yang mengelola perusahaan seperti dewan direksi atau para manajer perusahaan yang bertindak sebagai pembuat keputusan yang mutlak dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan prinsipal adalah para pemegang saham atau investor yang bertindak untuk mengevaluasi informasi-informasi dari perusahaan. Hubungan antara agen dengan prinsipal adalah hubungan yang terjadi antara mitra bisnis dimana agen sebagai pengelola perusahaan dan melakukan tugas-tugas tertentu

bagi prinsipal, sedangkan principal adalah pihak yang memberikan kontribusi dana kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) erat hubungannya dengan luas pengungkapan laporan tahunan. Hubungan antara teori keagenan dengan luas pengungkapan sangat penting bagi perusahaan khususnya perusahaan perbankan, karena dalam teori ini menjelaskan hubungan antara agen (sebagai pemilik atau yang menjalankan perusahaan) dengan principal (sebagai pemberi kontribusi dana) dimana perlunya manajemen perbankan melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (Hikmah, 2011). Dalam hubungan antara agen dan prinsipal terdapat asimetri informasi yaitu dimana agen mempunyai informasi tentang laporan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, dikarenakan agen hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan. Jadi dalam hal ini pihak agen mengetahui lebih banyak tentang laporan keuangan perusahaan.

TEORI *STAKEHOLDERS*

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan. Istilah *stakeholder* awalnya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI), yakni merujuk kepada “*those groups without whose support the organization would cease to exist*” (Freeman, 1983 dalam Anyta, 2011). Inti dari pemikiran itu kurang lebih mengarah pada keberadaan suatu organisasi (dalam hal ini perusahaan) yang sangat dipengaruhi oleh dukungan dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.

Dengan adanya teori *stakeholder*, perusahaan tidaklah bersifat individualis, dan bukan merupakan suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan tersebut harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya atau masyarakat luas seperti (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Handayani, 2011). Teori *stakeholder* dapat mempengaruhi perusahaan atau entitas untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena dengan adanya teori ini suatu entitas bukanlah suatu bidang usaha yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain, tapi masih membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meneruskan kegiatan operasionalnya.

MANDATORY DISCLOSURE DENGAN PENERAPAN IFRS

Mandatory disclosure didefinisikan sebagai suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan. *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012), dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku diungkapkan oleh perusahaan.

Pengungkapan wajib dan sukarela dalam laporan keuangan tahunan perusahaan telah diatur dan ditetapkan oleh standar akuntansi internasional IFRS. Tujuan penerapan IFRS adalah untuk menyelaraskan standar akuntansi

yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan di antara keduanya. Adopsi IFRS artinya mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan kedalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara (Prawinandi dkk., 2012).

Perusahaan-perusahaan di dunia telah dan sedang dalam proses untuk mengadopsi IFRS. Bermula dari benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Asia-Oceania, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Korea, Hong Kong, dan Singapura telah atau akan mengadopsi IFRS secara penuh. Afrika Selatan dan Israel telah mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Sebagian besar negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS.

Indonesia mulai mengadopsi IFRS mulai dari tahun 2008 sampai 2011 dimana pada tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap adopsi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 dan pada periode ini belum semua perusahaan-perusahaan di Indonesia belum diwajibkan menggunakannya, tahap persiapan akhir yang dilaksanakan selama tahun 2011 dan tahap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS serta dilakukan evaluasi secara komprehensif mulai tahun 2012 (Husin, 2008). Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi dengan penerapan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Prawinandi dkk., 2012).

JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS

Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan perbankan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen dan komisaris. Kedudukan masing-

masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kinerja dengan baik (Hikmah 2011). Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG, 2006).

Teori agensi juga menjelaskan mengenai ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris besar membantu dalam melakukan pemantauan lebih, membantu perusahaan dalam menyediakan sumber daya kritis, menghilangkan ketidakpastian lingkungan, dan mengurangi dominasi CEO (Chrysanti, 2010).

Selain dewan komisaris juga dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistiknya (Jensen dan Meckling, 1976). Hikmah, 2011 melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini mendukung hasil penelitian Al-Akra *et al.* (2010) di Aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Tetapi berbeda dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi (2012), jumlah anggota dewan

komisaris tidak berpengaruh tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konfergensi IFRS.

Peran anggota dewan komisaris adalah dalam mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Semakin besar proporsi jumlah anggota dewan komisaris diharapkan tindak kecurangan akan semakin sedikit dan dapat meningkatkan kepatuhan *Mandatory Disclosure* penerapan IFRS, karena besarnya jumlah anggota dewan komisaris memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Argumen di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah *et al.*, 2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan searah antara jumlah dewan komisaris dengan pengungkapan laporan tahunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H₁ Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS

KEPEMILIKAN DISPERSI DAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS

Struktur kepemilikan saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Sedangkan menurut Putranto (2013) Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh investor individu yaitu kepemilikan masyarakat umum atau kepemilikan dari pihak luar terhadap saham perusahaan. Kepemilikan dispersi hanya melihat pada pemisahan kepemilikan antara manajer dan pemilik ekuitas (Kusrinanti Dkk, 2011). Jadi, antara pihak kepemilikan terkonsentrasi dengan pihak yang mempunyai kepemilikan dispersi terdapat pemisahan kepemilikan saham. Perusahaan

dengan struktur kepemilikan yang menyebar (dispersi) cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang situs web mereka untuk memasok pemegang saham dengan informasi yang diperlukan oleh para pemegang saham. Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya >5% (Kusuma-wati, 2006; Hikmah, 2011).

Dalam teori agensi, dinyatakan perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan tingkat pengungkapan yang tinggi. Hal ini terjadi karena, pemilik saham dispersi meminta untuk pengungkapan secara transparan dengan tujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki saham terkonsentrasi oleh Rini (2010). Pemilik saham dispersi yang tinggi akan menginginkan pengungkapan laporan yang tinggi, karena para pemegang saham juga ingin mengetahui perkembangan perusahaan.

Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan dispersi dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya >5% (Kusumawati, 2006).

Perusahaan yang mempunyai struktur kepemilikan tersebar akan cenderung menyediakan pengungkapan informasi secara luas (Pramono, 2011). Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara variabel struktur kepemilikan dispersi dengan pengungkapan laporan tahunan (Abdelsalam dan Jalan, 2007; Trabelsi dan Labelle, 2006) dalam Kusrinanti (2011). Begitu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Hikmah (2011) yang menyatakan bahwa semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. Berdasarkan pernyataan- pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS

JUMLAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS

Tingkat pengungkapan wajib sangat di pengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *mandatory disclosure* dengan penerapan IFRS. Selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. Banyaknya rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mengindikasikan bahwa dewan komisaris tidak memutuskan sendiri mengenai pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk itu diadakan rapat dewan dengan tujuan agar terjadi lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Semakin sering rapat dewan komisaris dilakukan maka, semakin sering juga evaluasi mengenai kinerja perusahaan dan hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja bagi perusahaan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan

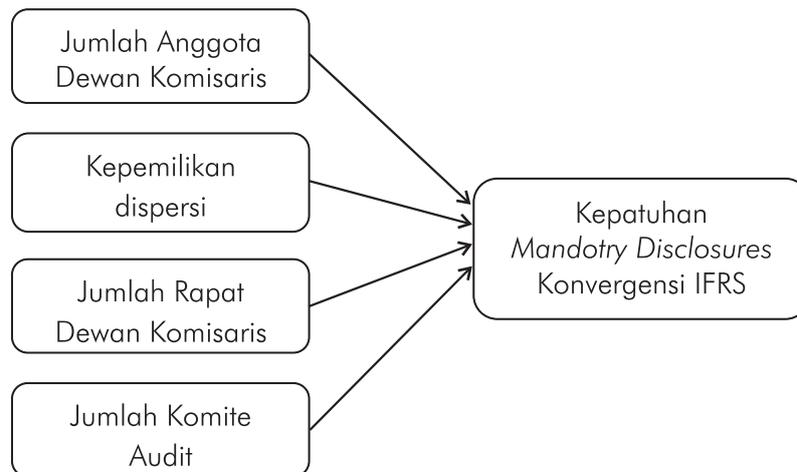
semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas. Dengan bahwa semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan pengungkapan *mandatory disclosure* dengan penerapan IFRS. Berdasarkan argument di atas, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS

JUMLAH ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS

Jumlah komite audit banyaknya komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury *et al.* 2004). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury *et al.*, 2004). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Suarayana, 2006).

Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang



GAMBAR 1. MODEL PENELITIAN

memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Penelitian Prawinandi *et al.* (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Jumlah komite audit yang berperan sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan (Suarayana, 2006). Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Suarayana, 2006). Oleh karena itu, persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan (Suarayana, 2006). Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H_4 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

METODE PENELITIAN

MODEL PENELITIAN

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

POPULASI DAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2012. Pemilihan sampel perusahaan perbankan ini dikarenakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI jumlahnya cukup banyak, dengan kondisi ini diharapkan dapat mewakili jumlah sampel perusahaan-perusahaan perbankan yang ada di Indonesia baik perusahaan yang terdaftar di BEI maupun yang tidak terdaftar di BEI.

JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi data akun akun dalam laporan keuangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dalam *annual report* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. Sumber data dari situs BEI dan situs perusahaan langsung.

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. *mandatory disclosure* dapat diartikan Pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008 dalam Prawinandi dkk., 2012). Identifikasi item pengungkapan menggunakan checklist BAPEPAM LK 2013. Item-item yang dipilih dari *checklist* ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk perusahaan manufaktur yang sudah konvergensi IFRS.

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik dikotomis, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan total klasifikasi *item* tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan dengan Jumlah seluruh kriteria *item* checklist pengungkapan yang telah ditetapkan BAPEPAM LK 2013 yang

sudah konvergensi IFRS. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ini adalah :

$$MANDSCORE = (\text{Total Klasifikasi yang di ungkapkan} / \text{Jumlah item}) \times 100\%$$

Variabel Independen

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah komisaris di perusahaan memainkan peran penting dalam pemantauan perusahaan dan dalam mengambil keputusan strategis. Dewan komisaris dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan CGC karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan komisaris diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{KOMISARIS} = \text{“ Dewan Komisaris”}$$

Jumlah Rapat Dewan komisaris

Tingkat pengungkapan wajib sangat dipengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *mandatory disclosure*. Selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. Jumlah rapat dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah seluruh rapat yang diselenggarakan selama satu periode.

Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan

TABEL 1. STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Deviasi Standar
MD	60	-.139	-.051	-.10267	.023352
JD	60	1	2	1.57	.354
JR	60	1	4	2.26	.759
JK	60	1	2	1.26	.237
KD	60	10.1266	-.6850	.936643	1.7666409

TABEL 2. HASIL UJI NILAI F

Model	Sum of Squeres	df	Mean Squeres	F	Sig.
Regression	.018	4	.005	29.360	.000
Resedidual	.008	55	.000		
Total	.027	59			

TABEL 3 TABEL UJI STATISTIK T

	Unstdized Coeffecients		Std. Coeff	t	Sig.
	β	Std. Error			
JD	.002	.001	.170	1.953	.056
JR	.001	.000	.685	7.947	.000
JK	.002	.002	.075	.862	.392
KD	.018	.010	.148	1.750	.086

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Prawinandi *et al.* 2012).

TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk melakukan pengujian hipotesis, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, auto-korelasi dan heteros-kesdatisitas). Selanjutnya dilakukan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda dilakukan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < nilai probabilitas (0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviation. Adapun deskriptif disajikan Pada Tabel 1.

Tabel 1 memberikan gambaran statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Variabel di atas menunjukkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* memiliki nilai minimum -0.139 ; nilai maksimum -0.051; nilai rata-rata -0.10267 dan standar deviasi sebesar 0,23352. Variabel jumlah anggota dewan komisaris (JD) memiliki nilai minimum 1; maksimum 2; nilai rata-rata 1.57 dan standar deviasi sebesar 0.354. Variabel jumlah rapat dewan komisaris (JR) memiliki nilai minimum 1; maksimum 4; nilai rata-rata 2.26 dan standar deviasi sebesar 0.759. Variabel jumlah komite audit (JK) memiliki nilai minimum 1;

maksimum 2; nilai rata-rata 1.26 dan standar deviasi sebesar 0,237. Variabel kepemilikan disperse (KD) memiliki nilai minimum -10.1266; maksimum -0.6850; nilai rata-rata -1.936643 dan standar deviasi sebesar 1.7666409.

UJI PENGARUH SIMULTAN (UJI NILAI F)

Berdasarkan hasil analisis (lihat Tabel 2) terlihat nilai F hitung pada model tersebut adalah sebesar 29.360 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel independen (JD, JR, JK, KD) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya NPL pada sektor perbankan di Indonesia. Dengan kata lain keseluruhan variabel secara simultan dapat digunakan sebagai prediktor model persamaan.

UJI STATISTIK T

Uji statistik *t* adalah pengujian secara parsial variabel X terhadap Y. Jika *t* hitung < α (0,05) maka terdapat pengaruh secara parsial variabel X terhadap Y. Namun jika *t* hitung > α (0,05) maka tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X terhadap Y.

Dari tabel 3 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{MANDSCORE} = 0,867 + 0,002(\text{JD}) + 0,001(\text{JR}) + 0,002(\text{JK}) + 0,018(\text{KD}) + e$$

Dari hasil uji regresi berganda, ditemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan signifikansi sebesar 0,056 mendekati α (0,05) sehingga jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan demikian hipotesis satu diterima.

Kepemilikan disperse memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,018 dengan signifikansi sebesar 0,086 > α (0,05) sehingga jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan demikian hipotesis dua ditolak.

Selanjutnya, jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan signifikansi sebesar 0,000 < α (0,05) sehingga jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan demikian hipotesis tiga diterima. Terakhir, jumlah anggota komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan signifikansi sebesar 0,392 > α (0,05) sehingga jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dengan demikian hipotesis empat ditolak.

TABEL 4. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Diterima
H ₂	Kepemilikan disperse berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak
H ₃	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Diterima
H ₄	Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS	Ditolak

DISKUSI

Penelitian ini menguji pengaruh jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan disperse. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel indepen-

den tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penerimaan hipotesis pertama ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi mudah dan cepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian suhardjanto,dkk (2010) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini mengidentifikasi kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib yang konvergensi dengan IFRS dengan berdasarkan tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya intensitas rapat dewan komisaris merupakan pertimbangan untuk tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (Muntoro, 2006; Utami *et al.*, 2012). Hal ini mendukung hasil penelitian Al-Akra *et al.* (2010) di Aman menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh jumlah komite audit terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS. Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penolakan hipotesis ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota komite audit yang terlalu besar akan Jika jumlah anggota komite audit terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang lebih tinggi. Sedangkan jumlah anggota yang kecil dianggap kurang efektif, aktif dan dinamis. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto *et al.* (2010) mengatakan jumlah anggota komite tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

okKepemilikan Dispersi terhadap tingkat pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Andersson dan Daoud (2005) dan Rini (2010) bahwa kepemilikan dispersi tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian Kusumawati (2006) bahwa kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance* dan Teori Agensi (Kusumawati, 2006).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata kepemilikan dispersi perusahaan perbankan cukup kecil sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia masih mengarah pada pola kepemilikan terkonsentrasi di mana para manajer menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas. Pihak non-pengendali menjadi kurang kuat untuk menekan pihak manajemen agar melakukan

pengungkapan yang lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi IFRS*, Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi IFRS*, Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi IFRS*, DAN Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi IFRS*

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, pertama, jangka waktu periode pengamatan hanya dua tahun dari tahun 2011-2012 sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan perbankan saja sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir pada tipe perusahaan lainnya. Ketiga, variabel-variabel yang digunakan hanya dari sisi perusahaan saja dan belum menggunakan faktor-faktor luar perusahaan atau factor makro ekonomi.

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian-penelitian serupa dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penelitian secara berkelanjutan agar diketahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure konvergensi IFRS* dari tahun ke tahun; (2) Memperluas objek penelitian, tidak hanya perusahaan perbankan tetapi seluruh perusahaan *non-financial*; dan (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan pengungkapan sukarela pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anyta. 2011. *Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat*

- Kepatuhan Mandatory Disclosure*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional AKuntansi XIII, Purwokerto.
- Elsaed. 2006. *Faktor-faktor yang mem-pengaruhi Luas Pengungkapan Corpo-rate Governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek Indonesia*. Skripsi Strata I. Universitas Muham-madiyah. Yogyakarta
- Ezat, A. dan A. El-Masry. 2008 dalam Kusriantini. 2011. The Impact of Corporate Governance on The Timeliness of Corporate Internet Reporting by Egyptian Listed Com-panies. *Managerial Finance*, 31 (12), 848-867.
- Gumanti, 2000. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional AKuntansi XIII, Purwokerto.
- Handayani. 2011. *Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah. Yogya-karta
- Hendriksen. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan*. Skripsi, Universitas Muham-madiyah. Yogyakarta
- Kusumawati, 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek Indonesia*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional AKuntansi XIII, Purwokerto.
- Muntoro, R. K. 2006. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. *Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Natalia, P. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corpo-rate Governance pada laporan tahunan*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional AKuntansi XIII, Purwokerto.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto dan H. Triatmoko. 2012. *Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional AKuntansi XIII, Purwokerto.
- Putranto, R. J. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengung-kan Corporate Governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek Indonesia*.
- Rini, A. K. 2010. *Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di buesa efek Indonesia*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah. Yogya-karta.
- Silviana, R. 2010. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kete-patan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. Skripsi, Universitas Muham-madiyah Yogyakarta.
- Utami, W. D., H. Sri dan S Djoko. 2012. *Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pe-ngungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance*. Paper Dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Yularto dan Chariri, 2003. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Pengung-kan Corporate Governance dalam laporan tahunan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.